

**PENGARUH KEADILAN ORGANISASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA SKPD KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

**OLEH :
TIA LESTARI
NPM. C1C010033**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2014**

**PENGARUH KEADILAN ORGANISASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA SKPD KABUPATEN KAUR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi

**OLEH :
TIA LESTARI
NPM. C1C010033**

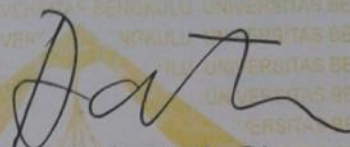
**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2014**

Skripsi oleh Tia Lestari ini

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 26 Februari 2014

Pembimbing,



Baihaqi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700603 199903 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19730203 199802 1 001

Skripsi oleh Tia Lestari ini
Telah dipertahankan di depan dewanpenguji
Pada Hari, Rabu, 26 Februari 2014

Dewan Penguji :

Ketua,

Baihaqi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19700603 199903 1 001

Anggota I,

Lismawati, SE., M.Si., Ak
NIP.19750217 2003 12 2 001

Anggota II,

Robinson, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 19750308 200003 1 003

Anggota III,

Isma Corvanata, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 19740306 199903 2 001

Mengetahui,
a.n. Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis-UNIB



Dr. Fahrudin Js. Pareke, SE., M.Si.
NIP. 19710914 199903 1 004

MOTTO

Jadikan cacian orang lain sebagai motivasi untuk sukses. Mereka boleh mencacimaki kita saat ini tapi yakinlah esok merekalah yang akan memuji-mujimu ^^

Jangan pernah bersedih saat orang lain tak menghargai kita tapi bersedihlah saat kita tak berharga lagi

~ T.Lestari E ~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tua tercinta, Bapak(**Drs. Edion Indra**) dan Ibu(**Tusmi Ghaini**), yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan do'a, nasehat, limpahan kasih sayang dan motivasi di kehidupan ku.
- * Adek-adekku tersayang **Kiando Pallas** dan **Jery Jasasi** yang telah memberikando'a dan menghiburku dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * **U.K.A** yang selalu memberikan nasehat dan support serta kasih sayang
- * Sahabat-sahabatku tersayang (**VANITIA**)
- * Keluarga Gedung K yang aku banggakan. **BERSAMA KITA BISA !!**
- * Almameterku, dan agamaku

THANKS TO

- * Allah .SWT yang selalu memberikan kekuatan dalam menjalankan semuanya
- * Bapak, Ibu dan Adek-adekku yang selalu mendoakan dan mendukungku hingga mengantarkanku mengapai gelar sarjana ini.
- * Dosen Pembimbingku Baihaqi, SE., M.Si., Ak., CA yang sangat sabar, baik, yang tidak pernah lelah dan mengeluh dalam membimbingku untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan dorongan dan keyakinan serta nasehat yang sangat berharga dalam menjalani hidup ini.
- * Dosen Penguji ku, IbuLismawati, SE., M.Si., Ak, Pak Robinson SE., M.Si., Ak., CA dan Ibulsma Coryanata, SE., M.Si., Ak., CA., yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik serta motivasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
- * Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala Jurusan, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi dan masukan selama di kampus.
- * Ibu Lisa Martiah NP, SE., M.Si., Ak CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing selama menempuh studi di Universitas Bengkulu.
- * Pak Eddy Suranta, SE., M.Si., Ak CA sebagai ayah keduaku yang telah memberikan saran dan bimbingan selama dikampus.
- * Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Gedung K (mbak Ning, mbak Elda dan buk Odah), Terima kasih Atas yang telah bapak ibu berikan yaitu ilmu, nasehat, semangat dan motivasi yang tulus yang tak mengenal rasa lelah.

- * Thanks buat U.K.A yang selaluberada di sampingku, memberikan nasehat, support dan selalu bisa nenangin disaat aku lagi stress dan suka buat pusing aku juga ^^
- * Untuk sahabatkuVavanut, Tayek, Nita dan Ancur yang selalu berada di sampingku disaat senang dan susah selama perkuliahan, menjadi keluarga dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * Makasih sahabatku Pai Anis yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku dan ayuk Intan ^^ yang selalu memberikan motivasi
- * Adek Dela yang udah rela minjamine laptopnya buat aku sehingga memperlancar aku dalam mengolah data. Makasih juga buat sepupuku Vita yang udah bantu-bantu kerjaan rumah waktu aku sibuk skripsi ^^
- * Teman-teman Akun Enjoy yang selama perkuliahan selalu menemani.
- * Thanks buat Bang Danang, Bang Oki dan Pasukan Kabir yang udah memberikanku semangat dan nasehat-nasehat.
- * Paman Alek dan bungsu Elly yang udah membantuku menyebarkan kuesioner serta memberikan tumpangan selama di Kaur.
- * Serta terima kasih seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Keadilan Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (*fraud*) Pada SKPD Kabupaten Kaur.

yang diajukan untuk di uji pada tanggal 26 Februari 2014, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik disengaja atau tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar sarjana dan Ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bengkulu, Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
9D52DACF157236454
6000 DJF
Tia Lestari

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) ON

Oleh:
Tia Lestari¹⁾
Baihaqi²⁾

ABSTRACT

This research is causative is to look at the causal relationship that describes the facts that happened clearly and prove the influence of the effect of organizational justice and Government Internal Control System (SPIP) of fraud on SKPD in. The sample used in this study were all working units (SKPD) in Kaur. The analysis used is multiple linear regression analysis.

The research concludes that: 1) organizational justice has a negative effect on cheating. The higher the organizational justice will lower fraud and 2) Government Internal Control System has a negative effect on fraud. The better the implementation of the Internal Control government then fraud would be lower. Independent variables affect the dependent variable was 28.4%.

Keywords : Organizational Justice, Government Internal Control System, Fraud

¹⁾Student

²⁾Supervisor

**PENGARUH KEADILAN ORGANISASI DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA SKPD KABUPATEN KAUR**

**Oleh:
Tia Lestari¹⁾
Baihaqi²⁾**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kausatif yaitu untuk melihat hubungan sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan membuktikan pengaruh keadilan organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan (*fraud*) pada SKPD Kabupaten Kaur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kaur. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) keadilan organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan. Semakin tinggi keadilan organisasi maka tindak kecurangan akan semakin rendah dan 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki dampak negatif terhadap kecurangan. Semakin baik pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka tindak kecurangan akan semakin rendah. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 28.4 %.

Kata kunci: Keadilan Organisasi, SPIP, Kecurangan

¹⁾ Mahasiswa

²⁾ Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) Terhadap Kedurangan (*Fraud*)”.

Peyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Orang tuaku yang selalu memberikan motivasi, restu dan doa yang tak terhingga untukku.
2. Bapak Baihaqi, SE.,M.Si.,Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi dan masukkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Ibu Lismawati, SE., MSi., Ak, Pak Robinson SE., MSi., Ak., CA dan Ibu Isma Coryanata, SE., MSi., Ak., CA. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi, dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, yang telah memberikan motivasi.
5. Ibu Lisa Martiah NP, SE., M.Si., Ak CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menjalankan proses belajar di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.
6. Bapak Dr. Fahrudin Js. Pareke, SE.,M.Si selaku a.n Dekan Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
7. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Dosen Jurusan akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2010.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan dimasa akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selajutnya.

Bengkulu, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah.....	6

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

2.1 <i>Fraud Triangle Theory</i>	7
2.1.1 Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	10
2.1.2 Faktor Penyebab terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>)	11
2.1.3 Jenis-Jenis Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	12
2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	15
2.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	15
2.2.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah....	16
2.2.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP	20
2.3 Keadilan Organisasi	21
2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis.....	23
2.2.1 Keadilan Organisasi dan kecurangan (<i>fraud</i>).....	23
2.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kecurangan (<i>fraud</i>)	24
2.5 Kerangka Teori.....	24

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
3.3.1 Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	28

3.3.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	29
3.3.3 Keadilan Organisasi	29
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Metode Analisis Data	31
3.5.1 Uji Kualitas Data	31
3.5.1.1 Uji Validitas	31
3.5.1.2 Uji Reliabilitas	31
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	32
3.5.2.1 Uji Normalitas	32
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	32
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	33
3.5.3 Uji Hipotesis	33
3.5.3.1 Uji F	34
3.5.3.2 Uji t	34
3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi	35

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data	36
4.1.1 Tingkat Pengembalian (<i>Response Rate</i>).....	36
4.1.2 Deskriptif Responden.....	37
4.2 Statistik Deskriptif	39
4.3 Pengujian Kualitas Data	41
4.3.1 Uji Validitas	41
4.3.2 Uji Reliabilitas	42
4.4 Uji Asumsi Klasik	43
4.4.1 Uji Normalitas	43
4.4.2 Uji Multikolinearitas	44
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan	46
4.4.1 Uji Hipotesis	46
4.6 Pembahasan	48
4.4.1 Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	48
4.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecurangan(<i>Fraud</i>).....	49

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Implikasi Penelitian.....	52
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	54
5.4 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Fraud Triangle Theory</i>	9
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	36
Tabel 4.2 Deskriptif Responden.....	37
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4.6 Normalitas Data	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Tabulasi data Keadilan Organisasi
Lampiran 3	Tabulasi Data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran 4	Tabulasi Data Kecurangan(<i>fraud</i>)
Lampiran 5	Deskriptif Statistik
Lampiran 6	Uji Validitas Keadilan Organisasi
Lampiran 7	Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran 8	Uji Validitas Kecurangan(<i>fraud</i>)
Lampiran 9	Uji Reliabilitas Keadilan Organisasi
Lampiran 10	Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran 11	Uji Reliabilitas Kecurangan(<i>fraud</i>)
Lampiran 12	Uji Normalitas Data
Lampiran 13	Uji Multikolonearitas
Lampiran 14	Uji Heterokedastisitas
Lampiran 15	Uji Hipotesis
Lampiran 16	Nama-nama SKPD dan Surat-Surat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, kecurangan (*fraud*) adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, kecurangan (*fraud*) sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan kecurangan (*fraud*) merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kecurangan (*fraud*) mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregulation*) dan tindakan ilegal yang dicirikan dengan manipulasi yang disengaja, dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi oleh orang luar atau dalam organisasi.

Kecurangan akuntansi yang terjadi di Pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu (a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat, (c) membantu pemerintah dalam

memberikan akuntabilitas kepada masyarakat (Chan, 2003).

Cressey dalam Rosnalia (2012) mengemukakan bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan (*fraud*) ada tiga yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi atau pembenaran (*razionalization*) yang kemudian dikenal dengan elemen kecurangan (*fraud*) atau *fraud triangle*, yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan makin besar. Bukan hanya itu buruknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga akan membuat peluang untuk tidak jujur.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diperbarui Nomor 59 tahun 2007 diperbarui Nomor 21 tahun 2011 sistem akuntansi pemerintahan meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Kecurangan terjadi biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern dan adanya ketidakadilan antar pegawai sehingga menimbulkan kecemburuan. Sistem Pengendalian Intern di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai

suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (PP No 60 Tahun 2008).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah konsekuensi logis bagi sebuah institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. setiap lembaga Pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem Pengendalian Intern di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (Penjelasan umum PP No 60 Tahun 2008).

Bukan hanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah saja yang dapat mendorong tercapainya tujuan dengan baik, namun keadilan organisasi juga sangat

berpengaruh. Dimana ketika seseorang mendapat perlakuan yang tidak adil maka akan menimbulkan kecemburuan antar pegawai dan mereka akan melakukan perlawanan protes atau membalasnya dengan berdusta dan melakukan kecurangan (*fraud*). Bila keadilan pada pegawai terpenuhi dengan baik maka produktivitas dan hasil kerja pegawai akan meningkat dan menghilangkan motivasi untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Dalam penelitian Herman (2013) bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Keadilan akan menghilangkan tindakan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Sedangkan ketidakadilan akan meningkatkan tindakan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Kecurangan (*fraud*) akuntansi diduga sudah lama berkembang di berbagai Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kaur. Terbukti tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindakan *fraud* di Kabupaten Kaur untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan karena belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaur untuk tahun anggaran 2009 menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur masih lemah. Sehingga menyebabkan yang pertama pengelolaan dana bergulir pemerintah Kabupaten Kaur senilai Rp. 2.143.850.000,00 tidak tertib sehingga belum dapat dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kedua beberapa SKPD belum tertib dalam mengelolah dan

mengadministrasikan persediaan sehingga persediaan per 31 desember belum akurat. Terakhir pemberian bantuan sebesar Rp. 6.141.850.000,00 tidak didukung laporan pertanggung jawaban penggunaannya dan sebesar Rp. 181.080.000,00 dicairkan melalui anggaran belanja barang dan jasa (LKPD Kaur 2009).

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Kaur. Dengan menggunakan variabel independen Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat melihat pengaruhnya terhadap kecurangan (*fraud*). Adapun judul dari penelitian ini yaitu ***“Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada SKPD Kabupaten Kaur”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) ?
- 2) Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

- 1) Pengaruh keadilan organisasi terhadap kecurangan (*fraud*)

- 2) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kecurangan (*fraud*)

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.

- 2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (*Fraud*). Dan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini fokus membahas pengaruh keadilan organisasi serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan (*fraud*) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kaur. Keadilan organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan distributif, prosedural dan interaksional. Sedangkan SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja. Kecurangan yang dimaksud disini adalah *Incentive/Pressure, Opportunity dan Rationalization*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *FraudTriangleTheory*

Fraud triangle theory merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*:

a. Tekanan (*Pressure*)

Terdapat tekanan yang berbeda-beda yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Arens (2008) mendefinisikan *perceived pressures* sebagai situasi dimana manajemen atau karyawan memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (*pressure*) antara lain:

- 1) Masalah keuangan, seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, biaya kesehatan yang besar, kebutuhan tak terduga.
- 2) Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba.
- 3) Lingkungan pekerjaannya, misalnya sudah bekerja dengan baik tetapi kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk.
- 4) Lain-lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga

b. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah situasi dimana seseorang percaya bahwa dia memiliki keadaan yang menjanjikan atau memungkinkan untuk melakukan

fraud dan tidak dapat terdeteksi *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menyebutkan bahwa kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud* harus ada agar *financial statement fraud* dapat terjadi. Kesempatan dapat timbul akibat kurangnya pengawasan dewan direksi maupun komite audit, pengendalian internal yang lemah, transaksi yang tidak biasa ataupun rumit, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian subjektif yang signifikan, dan staf audit internal yang tidak efektif. Pada umumnya *fraud* tidak berhasil dilakukan pada organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, dan para karyawan yang menyadari bahwa pengendalian tersebut dibuat untuk mencegah *fraud*.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) seseorang berbuat *fraud* antara lain:

- 1) Sistem pengendalian internal yang sering juga disebut pengendalian internal, yang lemah.
- 2) Tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya.
- 3) Kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya.
- 4) Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.
- 5) Lalai, apatis, acuh tak acuh.
- 6) Kurang atau tidak adanya *audit trail* (jejak audit), sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data.

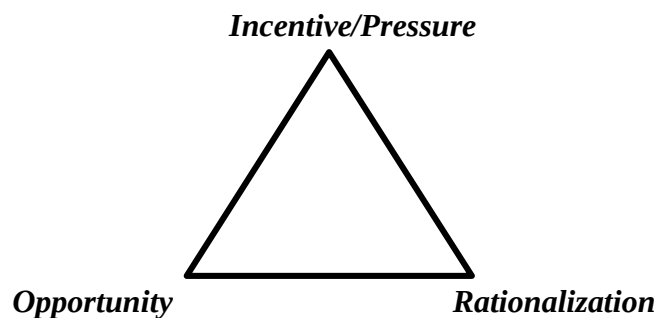
c. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi (*rationalization*) menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Rasionalisasi atau sikap (*Attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) asset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran (*rationalization*) atas tindakannya melakukan *fraud*, antara lain :

- 1) Mencontoh atasan atau teman sekerja.'
- 2) Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan.
- 3) Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.
- 4) Dianggap hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.

Ketiga hal diatas digambarkan dalam gambar berikutini:



Gambar 2.1

Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953)

2.1.1 Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2006, dijelaskan bahwa kecurangan sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Alison (2006) kecurangan (*fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahanakuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan meyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan sebagian pihak. Singkatnya, kedua kategori kesalahan akuntansi di atas dibedakan oleh motif tujuannya, apakah sengaja (*unintentional*) atau sengaja (*intentional*).

2.1.2 Faktor Penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*)

Menurut Tuanakotta (2010), ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Namun ada makna dari ungkapan itu. Kalau ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin penyebab. Menghilangkan atau menekan *need* dan *greed* yang mengawali terjadinya *fraud* dilakukan sejak menerima seseorang (*recruitment process*). Sedangkan unsur *by opportunity* dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalian intern.

Penyebab-penyebab terjadinya kecurangan menurut Tunggal (2010) digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Penyebab utama

- 1) Penyembunyian (*concealment*): kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya.
- 2) Kesempatan/Peluang (*opportunity*): pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi.
- 3) Motivasi (*motivation*): pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/ kelobaan/ kerakusan dan motivator yang lain.
- 4) Daya tarik (*attraction*): sasaran dari kecurangan perlu menarik bagi pelaku.
- 5) Keberhasilan (*success*): pelaku perlu menilai peluang berhasil, yang dapat diukur dengan baik untuk menghindari penuntutan atau deteksi.

b. Penyebab sekunder

- 1) *A Perk*: akibat kurangnya pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangan sebagai suatu tunjangan karyawan.
- 2) Hubungan antar pemberi kerja/pekerja yang jelek: rasa saling percaya dan menghargai antar pemberi kerja dan pekerja telah gagal.
- 3) Pembalasan dendam (*revenge*): ketidaksukaan terhadap organisasi mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
- 4) Tantangan (*challenge*): karyawan yang bosan dengan lingkungan kerjanya berusaha mencari stimulus dengan memukul sistem, yang dirasakan sebagai suatu pencapaian atau pembebasan dari rasa frustrasi.

2.1.3 Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Tuanakotta (2010), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2004) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut:

a. Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- 1) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*): pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang

mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.

- 2) Suap (*bribery*): penawaran, pemberian, penerimaan/ permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- 3) Pemberian ilegal (*illegal gravity*): pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi/kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
- 4) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*): pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

b. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- 1) Kecurangan kas (*cash fraud*): yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.

- 2) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*): kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

c. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- 1) *Timing difference (improper treatment of sales)*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.
- 2) *Fictitious revenues*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- 3) *Concealed liabilities and expenses*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- 4) *Improper disclosure*: perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.
- 5) *Improper asset valuation*: bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara

- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

2.2.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Ia bukan bagian terpisah dari kegiatan, ataupun ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Sebaliknya, SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja instansi pemerintah. Ini tercermin dalam unsur-unsur yang ada dalam SPIP, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian dalam SPIP merupakan unsur dasar bagi pembentukan unsur-unsur lainnya, dalam membangun SPIP unsur dasarnya harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPIP dapat terwujud. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun dan sebaliknya.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya yang tepat
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Usaha pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah dan dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan harus dilaksanakan, kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- 1) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik atas asset
- 5) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang

- 1) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 2) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 3) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 4) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

- 5) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan asset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera

ditindak lanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.2.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu:

- a. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
- b. Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia;
- c. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak;
- d. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.

2.3 Keadilan Organisasi

Menurut Folger dan Greenberg dalam Byrne et al (2003) pengertian keadilan organisasi lebih merujuk pada bentuk evaluasi individu terhadap perlakuan organisasi terhadap karyawannya dalam hal upaya yang fair untuk mendapatkan hasil yang baik. Keadilan organisasi menurut Hassan dan Chandaran (2005) meliputi: keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional.

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif berkaitan dengan kewajaran alokasi sumber daya. Menurut Cowherd and Levine, 1992 dalam Christofel (2010) teori kewajaran mengatakan bahwa manusia dalam hubungan sosial mereka, berkeyakinan bahwa imbalan organisasi harus didistribusikan sesuai tingkat kontribusi individual. Teori kewajaran (*equity theory*) mengatakan bahwa manusia dalam hubungan sosial mereka, berkeyakinan bahwa imbalan-imbalan organisasi harus didistribusikan sesuai dengan tingkat kontribusi individual.

b. Keadilan Prosedural

Keadilan Prosedural memusatkan pada kewajaran proses pengambilan keputusan. Taylor et al, 1995 and Gilliland, 1993 dalam Christofel (2010) teori tentang keadilan prosedural yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil-hasil dan sumber daya organisasi kepada para anggotanya. Para peneliti umumnya mengajukan dua penjelasan teoritis mengenai proses psikologis yang mendasari pengaruh keadilan

prosedural, yaitu: controlproses atau instrumental dan perhatian-perhatian relasional atau komponen-komponen struktural.

c. Keadilan Interaksional

Keadilan Interaksional mengacu persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi atau *informal interaction* antara karyawan yang menerima keputusan dengan pembuat keputusan. Menurut Tyler (1989, 1994 dalam Yuwono, I dkk., 2005) menyebutkan ada tiga hal penting yang patut diperhatikan dalam membahas keadilan interaksional, yaitu:

1) Penghargaan

Khususnya penghargaan kepada status seseorang, hal ini tercermin dalam bentuk perlakuan. Lebih khusus lagi adalah bentuk perlakuan atau tindakan dari orang yang berkuasa (pimpinan) terhadap anggota kelompoknya. Apabila makin baik kualitas perlakuan pimpinan terhadap para anggota maka interaksinya dinilai makin adil oleh anggotanya.

2) Netralitas

Konsep ini berkembang karena butuh keterlibatan pihak ketiga manakala ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain. Netralitas dalam keputusan atas konflik kedua belah pihak dapat tercapai manakala dasar-dasar dalam pengambilan keputusan lebih banyak menggunakan fakta dan bukan opini, apalagi fakta yang ditampilkan mempunyai nilai objektivitas yang tinggi juga punya nilai validitas yang tinggi pula.

3) Kepercayaan

Hal ini yang banyak dikaji pada aspek keadilan interaksional. Kepercayaan (*trust*) sering didefinisikan sebagai harapan pihak lain dalam melakukan hubungan sosial, yang di dalamnya mencakup resiko yang berkaitan dengan harapan tersebut. Dalam Yuwono, I dkk., 2005 menyebutkan kepercayaan sebagai suatu pertaruhan terhadap hasil masa depan dengan menyerahkan kepada orang lain.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

2.4.1 Keadilan Organisasi dan Kecurangan (*Fraud*)

Keadilan organisasi adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerjaya yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Keadilan terdiri dari tiga macam yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.

Dalam penelitian Herman (2013) bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi keadilan dalam organisasi maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suhartini (2005) menjelaskan bahwa ketika seseorang mendapat perlakuan yang adil maka akan menghilangkan rasa kecemburuan antar karyawan dan mereka tidak akan melakukan perlawanan atau protes dan mereka tidak akan terdorong untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan seperti berdusta ataupun melakukan bentuk-bentuk kecurangan. Bila keadilan pada karyawan terpenuhi dengan baik maka produktivitas dan hasil kerja karyawan akan

meningkat dan menghilangkan motivasi untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan sehingga mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Jika keadilan dalam organisasi diterapkan dengan baik akan mengurangi tindakan untuk melakukan kecurangan.

Penelitian Christofel (2010) yang meneliti tentang moderasi pengendalian internal pada hubungan pengaruh keadilan organisasi terhadap tingkat kecurangan (*fraud*), menyimpulkan bahwa interaksi keadilan organisasi dengan Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh yang berarti terhadap *fraud* (tingkat kecurangan) karyawan. Hal ini berarti semakin tingginya Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal dapat mengakibatkan rendahnya *fraud* (tingkat kecurangan) karyawan.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan teori yang mendasari, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Keadilan Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan (*Fraud*)

2.4.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kecurangan (*Fraud*)

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta

mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (Penjelasan umum PP No 60 Tahun 2008).

Dalam penelitian Herman (2013) yang meneliti pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perusahaan, dengan sistem pengendalian intern yang baik, maka perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jika tujuan perusahaan telah tercapai berarti tindakan karyawan telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada tindakan yang merugikan perusahaan. Faktanya beberapa tindakan kecurangan terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal.

Dalam penelitian Rendika (2013) yang meneliti mengenai pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan SPIP maka tindakan penyalahgunaan aset akan semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang

signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Tuanakotta (2010), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

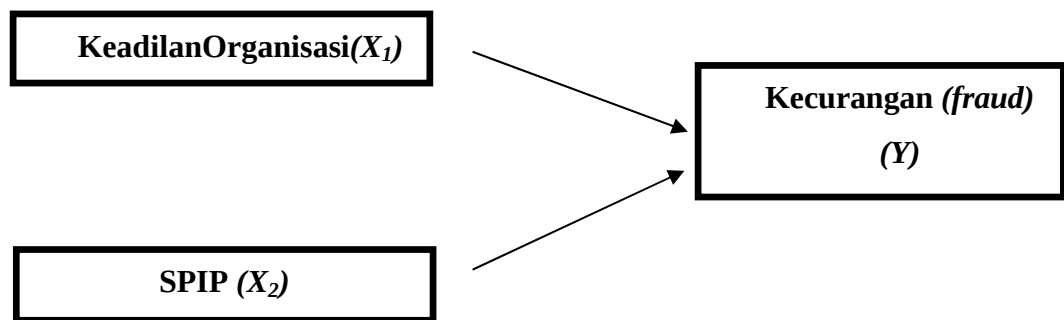
H₂:Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kecurangan (*Fraud*)

2.5 Kerangka Teori

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, berdasarkan batasan dan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengurangi tindakan Kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada pemerintahan, penerapan sistem pengendalian intern harus efektif. Selain itu menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui penerapan keadilan secara merata kepada seluruh pegawai juga dapat menurunkan motivasi untuk berbuat Kecurangan (*fraud*), karena

ketidakadilan yang dirasakan pegawai akan menjadi sebuah tekanan dan mendorong seseorang untuk melakukan Kecurangan (*fraud*).

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuatlah kerangka konseptual seperti pada gambar ini:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2012).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah Kecurangan (*fraud*), sedangkan variabel independen adalah Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3.2.1 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan sebagian pihak. Singkatnya, kedua kategori kesalahan akuntansi di atas dibedakan oleh motif tujuannya, apakah sengaja (*unintentional*) atau sengaja (*intentional*). Variabel ini diukur dengan instrument yang telah diukur oleh Herman (2013) yang dikembangkan dalam *Fraud Triangle Theory*, kecurangan

diukur dengan melihat tiga indikator yaitu *Incentive/Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization*. Daftar pernyataan terdiri dari 12 pernyataan. Frekuensi kecurangan (*fraud*) diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya kecurangan (*fraud*) sangat tinggi. Skala 5 S (Selalu), artinya kecurangan sangat rendah.

3.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan oleh Putri (2013) yang dikembangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern pemerintah diukur berdasarkan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Daftar pernyataan terdiri dari 15 pernyataan. Frekuensi SPIP diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya SPIP sangat rendah. Skala 5 S (Selalu), artinya SPIP sangat tinggi.

3.2.3 Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi merupakan bentuk evaluasi individu terhadap perlakuan organisasi terhadap karyawannya dalam hal upaya yang fair untuk mendapatkan

hasil yang baik. Variabel ini diukur dengan instrument yang telah digunakan oleh Herman (2013). Daftar pernyataan terdiri dari 8 pernyataan. Frekuensi Keadilan Organisasi diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Skala 1 TP (Tidak Pernah), artinya keadilan organisasi sangat rendah. Skala 5 S (Selalu), artinya keadilan organisasi sangat tinggi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Kaur. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu seluruh SKPD dijadikan sampel tanpa terkecuali. Sumber data dari penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan SKPD Kabupaten Kaur yang meliputi : Bendahara, PPK atau PPTK.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pegawai di SKPD Kabupaten Kaur dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survey yang dilakukan pada SKPD yang berada di Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ini adalah melalui daftar pertanyaan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke pegawai SKPD Kabupaten Kaur bagian pengelola keuangan. Media kuesioner akan memberikan

beberapa pilihan jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsisi dari masing-masing pernyataan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan. Data yang dihimpun dari hasil penelitian di lapangan, akan penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Corelation*, data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 (Ghozali, 2011).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada

tabel *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika $(r_i) > 0,7$ (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogrov-Smirnov test* dengan kriteria pengujian $\alpha 0,05$ sebagai berikut:

- a. Jika $sig \geq \alpha$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal
- b. Jika $sig \leq \alpha$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2011) pengujian Multikolinieritasakan menggunakan *Variance Inflationfactor* (VIF) dengan kriteriayaitu:

- a. Jika nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas antara variabel independen

b. Jika $\text{tolerance} > 0.10$ dan nilai $\text{VIF} < 10$, maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen

c.

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Glejser Test*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Pengujian ini berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan analisis berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Kecurangan

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi

X_1 :Keadilan organisasi
 X_2 :SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 ε : Kesalahan Pengganggu (*error term*)

Perhitungan dibantu dengan menggunakan software SPSS 16.0. Setelah hasil dari persamaan regresi diketahui, barulah bisa melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikan atau tidak.

3.5.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.3.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak

terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian R^2 digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila R^2 sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.